

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam, agama *rahmatan lil 'alamin*, rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad saw diutus ke dunia ini sebagai rahmat bagi seluruh manusia (Q.S. Al-Anbiya: 107), artinya nabi Muhammad saw membawa ajaran Islam untuk seluruh ummat manusia tanpa terkecuali. Islam bukan agama eksklusif yang hanya dimiliki oleh golongan tertentu, tetapi bersifat inklusif yaitu untuk semua manusia tanpa memandang perbedaan ras, agama maupun suku bangsa, baik laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, orang yang tinggal di desa maupun kota, mulai anak-anak hingga orang dewasa dan sampai tua, orang yang memiliki fisik yang lengkap maupun cacat, demikian juga bagi anak yang normal maupun anak berkebutuhan khusus. Menurut ahli tafsir, Muhammad bin Ali Asy Syaekani dalam *Fathul Qadir*: makna Q.S. Al-Anbiya: 107 adalah bahwa nabi Muhammad saw diutus dengan membawa hukum-hukum syariat, sebagai rahmat bagi seluruh manusia tanpa ada keadaan atau alasan khusus yang menjadi pengecualian.

Studi ini memusatkan perhatian pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) inklusif pada anak usia dini. Pendidikan Agama Islam dipandang sebagai sebuah strategi yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memiliki peranan yang sangat vital dalam membangun peradaban bangsa yang bermartabat (Nurlaila, 2011; Jaelani, 2015), untuk itu PAI sangat penting ditanamkan sejak awal bagi anak usia dini sebagai dasar bagi pembentukan kepribadian manusia secara utuh yaitu pembentuk karakter, budi pekerti yang luhur, cerdas, ceria, trampil, dan bertaqwa kepada Allah SWT (Srijatun, 2012).

Prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini terdapat dalam Q.S. Lukman ayat 12-19, dalam sebuah kajian tarbawi menyatakan bahwa prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini yang bisa diterapkan, seperti prinsip kebutuhan anak dalam hidup, prinsip belajar sambil bermain, prinsip lingkungan yang kondusif, prinsip pembelajaran yang terpadu, dan prinsip berulang-ulang dalam pembelajaran (Hatta, 2013).

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, tidak terkecuali anak usia dini dengan kebutuhan khusus, dalam sistem pendidikan inklusif, tanpa membedakan anak dari latar belakang suku, ras, status sosial, kemampuan ekonomi, status politik, bahasa, geografis, jenis kelamin, agama/kepercayaan, dan perbedaan kondisi fisik atau mental (Rahayu, 2013).

Anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang, bermain, beristirahat, berkreasi, dan belajar dalam suatu pendidikan. Jadi, belajar adalah hak anak, bukan kewajiban. Karena belajar adalah hak maka belajar harus menyenangkan, kondusif dan memungkinkan anak menjadi termotivasi dan antusias. Orang tua dan pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk anak dalam rangka program belajar (Hasyim, Suharyat & Noerhidayah, 2009). Orang tua wajib mengingat tanggung jawabnya terhadap anak-anak, agar tidak terjerumus kepada kedzaliman dikarenakan menyalahgunakan hak-hak anak, maka hendaknya orang tua memperhatikan hal-hal yang menjadi hak-hak anak (Siswandi, 2011).

Pentingnya memberikan pembelajaran PAI sejak anak usia dini, membutuhkan penanganan yang serius. Semua anak Islam, tanpa kecuali, tanpa membedakan berbagai latar belakangnya, perlu mendapatkan pembelajaran PAI sebagai pondasi dasar dalam menjalani kehidupannya. Lembaga-lembaga

pendidikan Islam anak usia dini, seperti Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Taman Kanak-kanak Islam (TK.I), Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT), Taman Asuh Anak Muslim (TAAM), dan lain sebagainya, membutuhkan pemahaman tentang pembelajaran PAI inklusif bagi anak usia dini, agar semua anak memperoleh layanan pendidikan Islam yang tepat.

Namun pada kenyataannya tidak semua sekolah ataupun guru mampu melaksanakan pembelajaran PAI inklusif pada anak usia dini, dikarenakan dalam penerapannya membutuhkan skill kompetensi guru yang mampu mengelola kelas inklusif, di samping ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga mampu mengakomodir kebutuhan seluruh peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran yang efektif.

Menanamkan nilai-nilai Islam bagi anak usia dini bukanlah hal yang mudah, apalagi bagi anak berkebutuhan khusus. Mendidik dan membiasakan anak untuk melakukan sholat, mengaji, berpuasa, membaca do'a, dan sebagainya, membutuhkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kemampuan anak. Perpaduan antara pendekatan dan strategi pembelajaran yang tepat, terbukti dapat meningkatkan pendidikan Islam di sekolah-sekolah Islam di dunia (Lubis, 2015). Dengan memperhatikan strategi pembelajaran yang sesuai dan juga pendekatan yang tepat bagi semua peserta didik, dapat meningkatkan mutu pendidikan Islam yang lebih baik di lembaga-lembaga pendidikan Islam (Shah, Ghazi, Shahzad & Ullah, 2015).

Sebuah fakta terjadi di lembaga PAUD kecamatan Sunggal, kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, seorang kepala sekolah terpaksa harus mengeluarkan seorang siswa berkebutuhan khusus karena anak tersebut tidak mengalami perkembangan selama masa pendidikan. Keseharian anak itu hanya berlari-lari

terus mengitari kelas, sambil berteriak-teriak, hingga mengganggu siswa yang lain. Kepala sekolah menyarankan kepada orangtuanya agar anak tersebut sebaiknya dididik di sebuah lembaga pendidikan khusus yang mampu menangani secara tepat. Namun karena keterbatasan biaya, mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya di Sekolah Luar Biasa.

Pihak sekolah PAUD mengambil keputusan untuk mengeluarkan siswa tersebut dengan berbagai pertimbangan, antara lain ketidaksiapan guru dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Beban materi pembelajaran yang begitu banyak harus diberikan kepada siswa, karena kebetulan lembaga tersebut adalah lembaga Islam, sehingga padat dengan muatan materi PAI, seperti hafalan surah pendek, hafalan do'a harian, asmaul husna, bacaan sholat, iqro', praktek ibadah, dan lain sebagainya. Bagaimana cara guru memberikan Pendidikan Agama Islam bagi siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti kasus di atas? guru tersebutpun tidak tahu jawabannya, karena memang belum pernah mengikuti pelatihan dan belum berpengalaman dalam menghadapi kasus tersebut.

Di sisi lain, sikap keberatan orangtua siswa yang lainnya akan keberadaan anak berkebutuhan khusus di kelas, mereka khawatir akan mengganggu anaknya selama proses pembelajaran di sekolah. Selain itu ketidaksiapan lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan program inklusif, seperti belum adanya rancangan manajemen program inklusif, belum adanya persiapan perencanaan pembelajaran yang matang, tidak didukung oleh sarana prasarana, media pembelajaran, ataupun alat permainan edukatif yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh anak.

Dalam sebuah kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh organisasi profesi guru, penulis coba bertanya (mewawancarai) beberapa guru dan kepala sekolah di

kecamatan Sunggal, kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terkait kisah yang terjadi di lembaga PAUD di atas, dengan menanyakan apakah mereka pernah memiliki pengalaman yang sama dengan lembaga PAUD tersebut, dengan menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah mereka. Umumnya sekolah-sekolah tersebut pernah mengalaminya.

Salah seorang kepala sekolah mencoba memberikan solusi dengan menyarankan bahwa untuk menghindari terjadinya hal tersebut, mereka membuat peraturan agar setiap orangtua yang datang untuk mendaftarkan anaknya sekolah, harus membawa anaknya, sehingga pihak sekolah bisa melihat secara langsung kondisi anak tersebut, dapat berbicara padanya dan bertanya langsung kepada orangtua tentang kondisi anaknya, sebagai cara deteksi awal peserta didik. Jika terlihat kejanggalan sejak awal, maka pihak sekolah tidak akan menerima anak tersebut.

Kemudian seorang guru juga menceritakan pengalamannya yang pernah memiliki siswa berkebutuhan khusus, karena pihak sekolah sudah terlanjur menerimanya. Siswa tersebut sulit sekali belajar membaca (kemungkinan disleksia), dan hal ini tidak terdeteksi saat penerimaan siswa baru. Guru tersebut menyatakan keinginannya untuk mengetahui cara mengatasi anak berkebutuhan khusus dengan metode yang tepat, namun mereka belum pernah memperoleh pelatihan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus.

Apakah benar siswa tersebut disleksia ataupun mengalami gangguan belajar lainnya? Apakah sudah ada pemeriksaan yang akurat dari psikolog? Umumnya mereka mengatakan bahwa tidak pernah ada pemeriksaan dari psikolog ataupun dokter yang ahli membidangi hal tersebut, karena orangtua keberatan

dengan biaya yang harus mereka keluarkan. Kondisi sekolah PAUD di kecamatan Sunggal kabupaten Deli Serdang memang umumnya melayani masyarakat pada tingkat sosial ekonomi menengah ke bawah, dan umumnya sekolah-sekolah PAUD tersebut memiliki siswa berkebutuhan khusus, tanpa mereka sadari sesungguhnya mereka sudah melaksanakan program inklusif, walaupun belum secara profesional, karena sekolah tersebut tidak mencanangkan program inklusif, dikarenakan keterbatasan SDM, dana, dan pengetahuan.

Kisah nyata di atas merupakan salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran PAI inklusif bagi anak usia dini juga banyak dijumpai di daerah lainnya, ini diketahui dari beberapa penelitian terdahulu, antara lain permasalahan dalam pembelajaran PAI inklusif bagi anak di kota Langsa-Aceh, yang disebabkan karena belum maksimalnya kompetensi guru PAI dan minimnya buku PAI untuk anak berkebutuhan khusus, sehingga proses pembelajaran kurang efektif dan efisien (Hanum, 2014). Kesalahan dalam pembelajaran PAI inklusif di PAUD dapat dilihat dari beberapa aspek, misalnya anak yang masih berusia 4-6 tahun selalu diberikan pembelajaran oleh gurunya melalui aspek kognitif dan belum melihat tujuan pembelajaran pada aspek afektifnya (Herni, 2018). Permasalahan juga terjadi pada lembaga PAUD inklusif di Zimbabwe, yang disebabkan karena terbatasnya kapasitas guru dan kurangnya pelatihan bagi guru dalam pengelolaan kelas inklusif (Majoko, 2017).

Permasalahan lain yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dana dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif menyebabkan pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media dan sumber belajar, serta lingkungan belajar yang beragam sesuai kebutuhan anak (Huda & Iman, 2017). Di samping itu,

Pemerintah kurang berperan dalam mendukung sarana dan prasarana serta alat permainan edukatif, sehingga fasilitas yang dimiliki sekolah sangat terbatas (Windarsih, dkk., 2017).

Berdasarkan informasi Direktorat PPK-LK (Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus) Pendidikan Dasar tahun 2010, menyatakan bahwa layanan pendidikan bagi ABK di Indonesia tergolong rendah, hal ini dikarenakan oleh sedikitnya tenaga pendidik yang bersedia dan mampu mendidik anak berkebutuhan khusus, serta kurang siapnya sekolah dalam memberikan akses pendidikan bagi ABK. Selain itu dipengaruhi juga oleh ketersediaan anggaran operasional dari Pemerintah Daerah yang sangat rendah untuk sekolah. Sedangkan permasalahan yang dialami sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusif disebabkan oleh, kondisi ekonomi orang tua yang rendah, jarak menuju sekolah luar biasa (SLB) dari rumah yang cukup jauh, minimnya dukungan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah, dan masih banyak sekolah reguler yang tidak mau menerima ABK untuk bersama-sama belajar dengan anak-anak normal seusianya, karena khawatir akan menurunkan kualitas sekolah (Mudjito, Harizal & Elfendri, 2012).

Data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2017 tentang jumlah ABK di Indonesia yaitu sebesar 1,6 juta. Upaya untuk memberikan akses pendidikan yang dilakukan oleh Kemendikbud, diantaranya adalah dengan memotivasi sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, serta membangun lembaga-lembaga pendidikan luar biasa yang baru. Dari jumlah 1,6 juta ABK tersebut, baru 18% yang telah memperoleh layanan dalam pendidikan inklusif (Azzahra, 2019).

Berdasarkan data, wawancara, dan pengalaman langsung yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan di lembaga pendidikan Islam anak usia dini, yaitu: *pertama*, kurangnya kompetensi guru dalam memahami dan menangani siswa-siswa berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan pendidikan secara khusus; *kedua*, rendahnya dukungan orangtua terhadap anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini terkait pemahaman, perhatian, dan dana pendidikan; *ketiga*, lemahnya manajemen sekolah yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh anak, dalam hal ini terkait dengan pemahaman, sistem pendidikan inklusif dan dana penyelenggaraan pendidikan; *keempat*, diskriminasi masyarakat terhadap ABK untuk dapat belajar dalam satu lembaga pendidikan bersama dengan siswa normal seusianya, serta *kelima*, kurangnya perhatian pemerintah dalam merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan mengenai pendidikan inklusif, artinya pemerintah memang mencanangkan, membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, namun tidak diimbangi dengan upaya peningkatan kompetensi guru dalam mengatasi siswa berkebutuhan khusus, tidak pula melakukan upaya diklat agar sekolah mampu menyusun sistem manajemen sekolah yang mendukung pelaksanaan program pendidikan inklusif, serta minim dalam memberikan bantuan pada pihak sekolah untuk pengadaan sarana, prasarana, media pembelajaran, maupun alat permainan edukatif yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar bagi seluruh anak, terutama baik anak-anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan pendidikan khusus.

Permasalahan di atas sebetulnya merupakan keresahan pribadi penulis, hingga pada sebuah pelatihan di tahun 2016 yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi profesi guru-guru Raudhatul Athfal Sumatera Utara, yang mengundang



narasumber seorang kepala sekolah sebuah RA Inklusif dari Jakarta, yaitu RA. An-Nahl, beliau memberikan pembelajaran tentang metode gerakan yang beliau ciptakan agar anak usia dini mudah menghafal dan memahami hadits-hadits sederhana, hal ini sangat menarik. Ketertarikan tersebut berlanjut dengan mengunjungi RA. An-Nahl pada bulan Januari tahun 2017 untuk mengetahui lebih jauh proses pembelajaran yang berlangsung disana. Saat itu hanya sebatas melakukan kunjungan observasi yang belum mendalam, namun penulis tetap bertekad untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan pembelajaran PAI inklusif pada anak usia dini.

Akhirnya dipilihlah RA. An-Nahl Jakarta sebagai lokasi penelitian, dengan alasan; *pertama*, RA. An-Nahl ini merupakan lembaga pendidikan Islam anak usia dini, yang telah menerapkan sistem pendidikan inklusif sejak tahun 2004; *kedua*, RA. An-Nahl menempatkan pembelajaran PAI dan pendidikan karakter sebagai materi unggulan di lembaganya; *ketiga*, berdasarkan observasi awal yang dilakukan, diketahui bahwa RA. An-Nahl banyak memperoleh penghargaan antara lain antaranya Juara I Kepala RA Tingkat Nasional tahun 2015, penerima penghargaan Apresiasi Pendidikan Islam dari Menteri Agama RI 2015, penerima penghargaan Sekolah Ramah Autis dari Gubernur DKI Jakarta tahun 2015, hingga menerima Satya Lencana dari Presiden RI tahun 2016 sebagai Lembaga Pendidikan RA terbaik. Selain itu, alasan yang *keempat*, RA. An-Nahl merupakan sekolah percontohan, yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama RI, sehingga banyak dikunjungi sekolah-sekolah lain dari berbagai daerah di Indonesia maupun luar Indonesia untuk kegiatan studi banding, hingga kini tercatat lebih dari 1000 lembaga yang telah berkunjung ke RA. An-Nahl baik dari dalam maupun luar negeri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembelajaran PAI inklusif pada anak usia dini yang dilakukan di RA. An-Nahl, Jakarta?
2. Apa saja permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pembelajaran PAI inklusif pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini?
3. Apa alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan pembelajaran PAI pada anak usia dini yang dilakukan oleh RA. An-Nahl?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan studi ini adalah:

1. Mendeskripsikan pembelajaran PAI inklusif pada anak usia dini yang dilakukan di RA. An-Nahl, Jakarta.
2. Mengklasifikasi dan menganalisis permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pembelajaran PAI inklusif pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Menganalisis alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan pembelajaran PAI pada anak usia dini yang dilakukan oleh RA. An-Nahl, Jakarta.

Secara kontekstual perencanaan dan evaluasi pembelajaran dapat menjadi instrumen bagi guru-guru PAUD dalam menjalankan proses pembelajaran. Hal ini menarik untuk diulas, mengingat perencanaan pembelajaran dan evaluasi merupakan bagian penting yang mendukung implementasi pembelajaran. Proses pembelajaran inklusif juga dapat menjadi acuan bagi pada pendidik PAUD.

Studi ini juga bertujuan untuk menawarkan alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif di lembaga PAUD, khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak usia dini, dengan mengklasifikasi permasalahan yang dijumpai di lapangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat secara teoretis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoretis**

Studi ini memberikan sumbangan keilmuan sebagai dasar pijakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam Inklusif pada anak usia dini, sekaligus menambah literatur atau sumber kepustakaan terutama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam anak usia dini.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sedangkan secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat, yaitu: (a) bagi guru dapat mengimplementasikan pembelajaran PAI inklusif untuk anak usia dini, mulai dari menyusun rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, hingga proses penilaian; (b) bagi lembaga PAUD sebagai masukan konsep pembelajaran PAI insklusif pada anak usia dini; (c) bagi pemerintah, agar lebih memperhatikan penyelenggaraan pendidikan Islam anak usia dini, dengan memberikan bantuan dan pelatihan peningkatan kualitas SDM guru-guru PAUD, dan (d) bagi peneliti lain yang berminat meneliti permasalahan PAI bagi anak usia dini, dari sudut pandang yang berbeda, untuk memperluas dan memperdalam khasanah ilmu pengetahuan.

### **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka dibutuhkan penegasan beberapa istilah yang akan dijumpai dalam penelitian ini, yaitu:

*Pertama*, Pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud adalah aktivitas belajar mengajar, yaitu adanya interaksi antara siswa sebagai pembelajar dan guru sebagai pengajar atau sumber belajar lainnya dalam suatu lingkungan pendidikan. Pembelajaran merupakan upaya guru dalam mengelola kegiatan belajar agar perilaku siswa berubah menjadi lebih baik, dengan memberikan materi pelajaran untuk mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa.

Dalam tulisan ini fokus pada proses pembelajaran PAI di Raudhatul Athfal (RA), siswa yang dimaksud adalah anak usia dini, usia 4-6 tahun, baik itu siswa normal maupun anak berkebutuhan khusus, yang berada pada satu lingkungan kelas inklusif di Raudhatul Athfal. Guru yang dimaksud adalah guru kelas ataupun guru pendamping dan guru pembimbing khusus bagi ABK, yang mengajar di Raudhatul Athfal.

*Kedua*, Pendidikan Agama Islam (PAI) Inklusif. PAI inklusif yang dimaksud adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada siswa, termasuk ABK, dalam suatu sistem pendidikan inklusif, sehingga siswa dapat mengetahui, memahami, meyakini, menghayati, dan mampu mengamalkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, sebagai pegangan hidupnya, melalui kegiatan, bimbingan, asuhan, pengajaran dan atau latihan, agar siswa dapat berperilaku sesuai akhlak Islam.

Tujuan PAI secara operasional terdapat dalam Kurikulum PAI yakni bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui pemberian

dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya kepada Allah SWT. serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Gunawan, 2012).

*Ketiga, Pendidikan Inklusif.* Sapon-Shevin menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Oleh karena itu, ditekankan adanya perombakan sekolah sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, sehingga sumber belajar menjadi memadai dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orangtua, dan masyarakat sekitarnya (O'Neil, 1994).

Pendapat senada menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Artinya, pendidikan inklusif merupakan pendidikan terpadu yang diharapkan dapat mengakomodasi pendidikan bagi semua, terutama anak-anak berkebutuhan khusus (Mudjito, Harizal & Elfindri, 2012).

Pendidikan inklusif ialah sebuah bentuk pendidikan yang memandang bahwa semua anak berhak untuk masuk ke sekolah reguler. Pandangan ini menganggap bahwa dengan pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus akan

dihargai dan diberikan pelayanan seperti halnya anak-anak lain pada umumnya. Pendidikan inklusif tidak menuntut anak berkebutuhan khusus untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat normal, akan tetapi anak berkebutuhan khusus diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, pendidikan inklusif harus tetap diperjuangkan demi menghargai dan melayani anak-anak berkebutuhan khusus, supaya mereka tumbuh dan berkembang seperti anak lainnya (Fadlillah, 2017).

Arti pendidikan inklusif yang telah dijelaskan di atas, berbeda dengan arti inklusi. Inklusi merupakan suatu pendekatan yang membangun atau mengembangkan suatu lingkungan yang menerima, memasukkan, atau mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan. Inklusi dapat diartikan sebagai kata benda, baik itu orang, tempat, ataupun sesuatu yang dibendakan, sehingga inklusi merupakan objek yang diberikan perlakuan atau tindakan. Sedangkan inklusif adalah kata sifat, yang diartikan sebagai cara memandang perbedaan dari sisi positif. Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan atau subjek yang memberikan perlakuan atau tindakan terhadap objek, tanpa memandang perbedaan yang ada. Secara internasional yang resmi digunakan adalah istilah ‘pendidikan inklusif’.

Kebijakan tentang sistem pendidikan inklusif telah menjadi kesepakatan internasional, seperti tercantum dalam *Declaration of Human Rights* (1948), juga *Convention of the Rights of the Child* (1989) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi *Education for All*. Statement mengenai pendidikan kebutuhan khusus terdapat pada permendiknas no.70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, landasan tersebut menegaskan bahwa

pendidikan pada semua jenjang harus dilaksanakan secara inklusif, sehingga proses penyelenggaraan sistem pendidikan yang memisahkan individu dari komunitasnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (Budiyanto, 2017).

Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan intervensi bagi anak berkebutuhan khusus sedini mungkin untuk meminimalkan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak dan untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas yang normal, jika memungkinkan untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidak teraturan perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan, serta untuk mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya (Mudjito, Harizal & Elfindri, 2012).

*Keempat*, Anak Usia Dini (AUD). Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Masa usia dini (0-6 tahun) merupakan masa keemasan di mana stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. Masa awal kehidupan anak merupakan masa terpenting dalam rentang kehidupan seseorang anak (Al-Tabany, 2016). Oleh karena itu pembentukan dasar keimanan dan ketakwaan, serta pembentukan watak dan karakter sangat tepat jika dilakukan pada usia dini (Salim, 2005).

Usia lahir sampai dengan memasuki pendidikan dasar merupakan masa keemasan sekaligus masa kritis dalam tahapan kehidupan manusia, yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Masa ini merupakan masa yang tepat untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan kemampuan fisik, bahasa, sosial emosional, konsep diri, seni, moral dan nilai-nilai agama. Sehingga upaya

pengembangan seluruh potensi anak usia dini harus dimulai agar pertumbuhan dan perkembangan anak tercapai secara optimal (Salim, 2007).

Kondisi yang memengaruhi anak usia dini yaitu faktor bawaan yang diturunkan dari kedua orangtuanya, baik bersifat fisik maupun psikis dan faktor lingkungan dipengaruhi oleh lingkungan dalam kandungan dan lingkungan di luar kandungan (keluarga, masyarakat, sekolah, dan lain-lain) (Gandasetiawan, 2011).

Pada kenyataannya setiap individu anak tidaklah sama, ada yang cepat menangkap pelajaran, ada yang standar, dan ada yang lambat dalam belajar. Gaya belajar anak juga beragam, tergantung perilaku dominan yang dimiliki anak. Untuk itu penting bagi guru anak usia dini memahami layanan pendidikan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus, sehingga mampu mengembangkan potensi anak secara optimal (Al-Tabany, 2016).

*Kelima*, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Keterlambatan perkembangan anak dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu; beresiko untuk menjadi terlambat berkembang, terjadi karena adanya faktor-faktor lingkungan yang bermakna dan besar kemungkinannya untuk menimbulkan keterlambatan tersebut, dan anak yang kehilangan kemampuan, diindikasikan dengan perkembangan yang berbeda dengan anak lain (Latif, dkk., 2016).

Anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki karakteristik yang tidak dimiliki anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus menandakan adanya kelainan khusus yang membutuhkan penanganan khusus dalam kesehariannya ataupun dalam memaksimalkan berbagai potensi yang dimiliki (Delphie, 2006).

Dari aspek pendidikan, siswa berkebutuhan khusus adalah siswa yang membutuhkan layanan khusus terkait pemberian pendidikan. Pendidikan khusus diberikan pada siswa yang berbeda dengan perkembangan siswa pada umumnya,



seperti siswa yang mengalami masalah dalam pemusatan perhatian, lambat dalam belajar, gangguan perilaku dan emosi, mentalnya terbelakang, autisme, cedera otak traumatis, mengalami beberapa hambatan, seperti hambatan fisik, penglihatan, pendengaran, komunikasi, atau memiliki bakat khusus (talenta), sehingga membutuhkan cara belajar yang khusus atau berbeda dari umumnya (Hallahan & Kauffman, 2006).

Perlu dijelaskan perbedaan arti anak berkebutuhan khusus (ABK), dengan anak luar biasa, disabilitas, dan difabel. Dalam buku panduan layanan khusus UNJ, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak luar biasa adalah anak di luar keadaan biasa atau adanya penyimpangan dari kondisi normal. Disabilitas adalah orang yang mengalami ketidakmampuan/hambatan/kekurangan/keterbatasan/kesulitan untuk melakukan sesuatu, sehingga membutuhkan alat bantu, contohnya orang yang membutuhkan kursi roda untuk bergerak, karena dia tidak memiliki kaki. Difabel adalah orang yang memiliki kemampuan dengan cara yang berbeda, karena kondisi fisik atau mentalnya yang berbeda, contohnya orang yang pandai bermain gitar dengan kaki, karena dia tidak memiliki tangan. Sedangkan anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang butuh cara belajar yang berbeda (khusus), bisa bersifat sementara, jika anak sudah berhasil dalam terapinya, maka akan diberikan pendidikan secara umum seperti anak normal lainnya.

Dalam tulisan ini yang digunakan adalah istilah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), karena difokuskan pada cara pembelajaran anak secara khusus di lembaga pendidikan Islam anak usia dini inklusif.

*Keenam*, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pengertian PAUD terdapat dalam Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 butir 14. PAUD sebagai

pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, memiliki kelompok sasaran anak usia 0-6 tahun yang sering disebut sebagai masa emas perkembangan. Di samping itu, pada usia ini anak-anak masih sangat rentan yang apabila penanganannya tidak tepat justru dapat merugikan anak itu sendiri. Oleh karena itu, penyelenggaraan PAUD harus memperhatikan dan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak (Direktorat PAUD, 2006).

Prinsip pembelajaran di PAUD adalah berorientasi pada kebutuhan anak, belajar melalui bermain, lingkungan yang kondusif, menggunakan pembelajaran terpadu, mengembangkan berbagai kecakapan hidup, menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar, dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang, aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan, serta pemanfaatan teknologi informasi (Al-Tabany, 2016).

PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya (Al-Tabany, 2016).

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan sebelum anak memasuki jenjang pendidikan dasar, melalui jalur formal, nonformal, dan informal. PAUD formal, bisa berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat. PAUD nonformal berbentuk Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan PAUD informal, bisa berupa pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/lingkungan (Undang-Undang Sisdiknas 2003 pasal 28)

Raudhatul Athfal adalah bagian dari layanan PAUD untuk usia 4 sampai 6 tahun. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat dengan RA adalah Satuan

PAUD formal di bawah pembinaan Kementerian Agama Republik Indonesia, RA dalam penyelenggaraannya dapat berupa Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), dan Tarbiyatul Athfal (TA). Penamaan tersebut disesuaikan dengan karakteristik nomenklatur lembaga PAUD setiap organisasi keagamaan penyelenggara pendidikan usia dini (KMA-RI, 2018).

Raudhatul Athfal sebagai tempat pendidikan anak prasekolah, menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak yang berlandaskan ajaran Islam. Tujuan RA untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta untuk anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya berdasarkan ajaran Islam, dapat diwujudkan guru dengan menetapkan standar yang realistis untuk anak (Departemen Agama, 2005).

